

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 2020 di Indonesia perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan penurunan sebesar 2,07 persen sehingga menyebabkan kenaikan persentase masyarakat yang menganggur dan miskin (Badan Pusat Statistik, 2021). Pemerintah juga menghimbau para masyarakat agar tidak beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan beberapa keringanan berupa insentif pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang terdiri PPh UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh Pasal 22, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, Pengembalian Pendahuluan PPN dan dari PPh Pasal 21 DTP yang telah ada di Peraturan Kementrian Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020. Insentif DTP PPh 21 dengan kriteria tertentu akan ditanggung oleh pemerintah agar dapat meringankan keuangan perusahaan selama pandemic yaitu hanya pegawai atau WP yang berpenghasilan bruto kurang dari Rp 200.000.000,00 dalam setahun.

Pajak memiliki peran penting dalam berlangsungnya kehidupan bernegara terutama dalam pembangunan nasional. Pajak juga memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan seluruhnya. Adanya pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan antar masyarakat. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans & Daniel (KAP BTFD) merupakan perusahaan yang memberikan jasa audit atau mereview laporan PT TS merupakan perusahaan di bidang Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dengan jumlah karyawan sebanyak 22 orang. Insentif pajak DTP PPh 21 tidak bisa diterima

oleh semua karyawan di PT TS. Hal ini dikarenakan ada beberapa ketentuan yang tidak dapat dipenuhi oleh karyawan tersebut.

Dengan adanya bantuan dari pemerintah terkait insentif DTP PPh 21 ini, terdapat perbedaan besaran bantuan yang akan diterima tergantung berdasarkan perhitungannya. Pertimbangan penulis memilih judul “Prosedur Perhitungan dan Pencatatan Pajak DTP PPh 21 Pada PT TS” ini karena ingin mengetahui perhitungan insentif pajak DTP PPh 21 yang diterima oleh setiap karyawan serta pengaruh terhadap pelaporan keuangan di perusahaan PT TS.

1.2 Ruang Lingkup

Dilaksanakan di salah satu klien KAP BTFD di Surabaya yang memiliki mencakup identifikasi objek pajak PPh 21 beserta perhitungan dan pencatatan di perusahaan PT TS. Semua data yang didapat berasal dari perusahaan klien KAP BTFD yaitu PT TS.

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan dan penyusunan laporan ini yaitu:

- a. Menambah wawasan tentang penerapan insentif pajak DTP PPh 21 terhadap karyawan di PT TS beserta pencatatannya.
- b. Menerapkan pengetahuan yang sudah didapatkan selama menjalankan perkuliahan kedalam praktik kerja lapangan.

1.4 Manfaat

1. Mahasiswa

Menambah pengetahuan terkait penerapan pajak DTP PPh 21 secara langsung dari tempat praktik lapangan.

2. Prodi

Menjadikan referensi untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan pajak DTP PPh 21 dalam menyusun laporan agar dapat dikembangkan lebih dalam lagi untuk tugas akhir.

3. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Membantu pekerjaan yang ada di KAP BTFD sekaligus memberikan kontribusi dengan ikut aktif dalam kegiatan yang ada di KAP BTFD.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang topik yang dipilih sebagai laporan tugas akhir yang dicakup didalam latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat laporan beserta sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang definisi beserta pengertian yang diperlukan didalam laporan ini yang bersumber dari undang-undang maupun peraturan yang sedang berlaku.

BAB III Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari perusahaan KAP BTFD beserta susunan organisasinya sekaligus memberikan penjelasan tentang kegiatan yang di lakukan selama melakukan praktik kerja lapangan di KAP BTFD.

BAB IV Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pengaruh adanya insentif dari pemerintah yaitu perhitungan pajak DTP PPh 21 beserta pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan PT TS.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan tentang hasil kesimpulan dan saran yang didasarkan dari analisis yang dilakukan oleh penulis didalam laporan ini mengenai perhitungan insentif pajak DTP PPh 21 beserta pencatatan terhadap laporan keuangan di perusahaan PT TS.